

**PERGESERAN KEWENANGAN DAERAH OTONOM DALAM UNDANG-UNDANG
PEMERINTAH DAERAH PASCA REFORMASI
(Kajian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004)**

MASNA HAYATI

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan hak dan kewenangan bagi pemerintah untuk menggali potensi yang dimiliki dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk memenuhi kebutuhan serta pelayanan masyarakat. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pergeseran kewenangan pemerintahan daerah dibidang kehutanan, agraria dan fiskal pasca reformasi dan apa sajakah implikasi dari pergeseran kewenangan daerah otonom dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang Pergeseran Kewenangan Daerah Otonom Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasca Reformasi Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Pergeseran kewenangan pemerintahan daerah dibidang kehutanan, agraria atau pertanahan dan fiskal pasca reformasi yaitu di bidang kehutanan, sebagian besar kewenangan masih berada di tangan Pemerintah Pusat. Di tingkat daerah, kewenangan dalam pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta beberapa perizinan non-kayu diserahkan kepada Provinsi. Pemerintah Kabupaten diberikan porsi kewenangan terbatas dalam mengelola implementasi KPH sebagai penerusan kewenangan provinsi di tingkat Kabupaten/Kota. Di bidang pertanahan, Provinsi tidak mempunyai banyak kewenangan implementasi. Kabupaten/Kota mendapat porsi kewenangan yang lebih besar dalam hal mengidentifikasi dan mendaftarkan tanah-tanah ulayat dan tanah telantar. Sedangkan di bidang fiskal adalah kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan. Dan implikasi dari pergeseran kewenangan daerah otonom dalam sistem negara kesatuan republik indonesia yaitu dilihat di tingkat propinsi, di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat desa. Hal ini tentunya akan memberikan implikasi-implikasi tertentu bagi para penyelenggara otonomi daerah, khususnya yang berada pada ketiga tingkatan tersebut.

Kata Kunci : Pergeseran Kewenangan, Daerah Otonom, Pasca Reformasi

**SHIFTING OF AUTONOMOUS REGIONAL AUTHORITIES IN LOCAL
GOVERNMENT STATES POST REFORM
(Law Number 22 Of 1999 And Law Number 32 Of 2004)**

MASNA HAYATI

ABSTRACT

Implementation of regional autonomy in Indonesia provides the right and authority for the government to explore its potential and improve its financial performance to meet community needs and services. Provision of regional autonomy affects the economic growth of a region because it gives freedom to local governments to create their own financial plans and make policies that can affect the progress of the region.

The main problem in this research is how is the shift of authority of regional government in the field of forestry, agrarian and fiscal post-reformation and what are the implications of shifting authority of autonomous regions in the unitary state system of the Republic of Indonesia.

The research method used is in this study, the author uses normative legal research is the library of legal research (Library Research), the method of data collection by studying the books, legislation, and the writings associated with this research. The nature of the research, this study is descriptive analytical, which provides an image of a happening in a clear and detailed about the Autonomous Region Authority Shifts in the Law of Regional Government Post-Reformation in the System of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

From the research results can be concluded, Shifting authority of regional government in the field of forestry, agrarian or land and fiscal post-reform that is in the field of forestry, most of the authority is still in the hands of the Central Government. At the regional level, authorities in the implementation of forest area planning and utilization and some non-timber licensing are submitted to the Province. The District Government is granted a limited portion of authority in managing the implementation of FMU as a forwarding of provincial authorities at the Regency / City level. In the field of land, the Province does not have much implementation authority. Regency / Municipal gets a greater share of authority in identifying and registering ulayat lands and abandoned land. While in the fiscal sector is a policy that is done by changing the expenditure and state revenue that aims to create economic stability, employment opportunities, economic growth, and equity in the distribution of income. And the implications of the shifting authority of the autonomous regions in the unitary state of the republic of Indonesia are seen at the provincial, district and city levels. This will certainly give certain implications for the regional autonomy organizers, especially those at all three levels.

Keywords : Shifting Authority, Autonomous Region, Post Reformation